

TRANSFORMASI SISTEM PAJAK PENGHASILAN DI MANDAILING NATAL DI ERA EKONOMI DIGITAL**Dini Vientiany, Andika Saputra , Farhan Abbas, Tafana Ariani****Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**dinivientiany@Gmail.com, Bgdikakun99@Gmail.com, fa6226783@Gmail.com, tafanaariani04@Gmail.com**Abstract**

The transformation of the income tax system in Mandailing Natal in the digital economy era, particularly in the oil palm plantation sector, offers opportunities to improve efficiency and transparency in tax administration. This research uses a qualitative approach with a case study method, involving in-depth interviews, observations, and documentation studies to understand the dynamics that occur. The results show that the application of digital technology simplifies the tax reporting and payment process, but challenges such as low digital literacy among farmers, the complexity of tax regulations, and data protection issues remain key concerns. Education and socialization on tax obligations, as well as the need for policies that ensure data security, are essential to build public trust. Cooperation between the government, private sector, and society is also needed to encourage tax compliance. With the right measures, the transformation of the income tax system can support sustainable economic development in Mandailing Natal.

Keywords: Transformation Technology Social**Abstrak**

Transformasi sistem pajak penghasilan di Mandailing Natal di era ekonomi digital, khususnya dalam sektor kebun kelapa sawit, menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi untuk memahami dinamika yang terjadi. Hasil menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, namun tantangan seperti rendahnya literasi digital di kalangan petani, kompleksitas peraturan pajak, dan isu perlindungan data tetap menjadi perhatian utama. Pendidikan dan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan, serta perlunya kebijakan yang menjamin keamanan data, sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga diperlukan untuk mendorong kepatuhan pajak. Dengan langkah-langkah yang tepat, transformasi sistem pajak penghasilan dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Mandailing Natal.

Kata Kunci: Transformasi Teknologi Sosial**Article history**

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)**Copyright :** author**Publish by :** musytari

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Transformasi sistem pajak penghasilan di Mandailing Natal di era ekonomi digital menjadi isu yang semakin penting seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Mandailing Natal, yang dikenal sebagai daerah agraris dengan potensi besar di sektor perkebunan, khususnya kebun kelapa sawit, menghadapi tantangan dan peluang baru dalam pengelolaan pajak. Kebun kelapa sawit tidak hanya berkontribusi pada perekonomian lokal, tetapi juga merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak petani dan pengusaha di daerah tersebut. Dengan demikian, sistem perpajakan yang efisien dan transparan menjadi sangat krusial untuk mendukung pembangunan daerah (Chatterton & Newmarch, 2017).

Digitalisasi dalam sistem pajak penghasilan menawarkan berbagai kemudahan, seperti proses pelaporan dan pembayaran pajak yang lebih cepat dan akurat. Penggunaan aplikasi berbasis teknologi mempermudah pemerintah dalam mengumpulkan data dan memonitor kepatuhan pajak. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan literasi digital di kalangan petani dan pengusaha. Banyak dari mereka yang masih belum familiar dengan teknologi, sehingga memerlukan pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif untuk memahami sistem perpajakan yang baru.

Selain itu, perlindungan data pribadi menjadi isu yang semakin relevan. Dengan meningkatnya penggunaan sistem digital, risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi semakin tinggi (20316 78601-2-PB, n.d.). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa data wajib pajak dilindungi dengan baik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dapat terjaga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transformasi sistem pajak penghasilan di Mandailing Natal dapat berlangsung dalam konteks kebun kelapa sawit, dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, diharapkan temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih baik di era ekonomi digital.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi dan menganalisis transformasi sistem pajak penghasilan di Mandailing Natal dalam konteks kebun kelapa sawit. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena yang kompleks dan dinamis, serta menggali perspektif dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam sistem perpajakan.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai informan, termasuk petani kelapa sawit, pengusaha kebun kelapa sawit, pejabat pajak daerah, dan tokoh masyarakat (Raihandini et al., n.d.). Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai praktik perpajakan yang ada, tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem pajak digital, serta harapan dan aspirasi mereka terkait perubahan yang terjadi. Dengan cara ini, peneliti dapat menggali berbagai sudut pandang dan pengalaman yang relevan.

Kedua, observasi dilakukan di lapangan untuk memahami secara langsung proses administrasi pajak dan interaksi antara petani dengan petugas pajak. Observasi ini memberikan wawasan kontekstual yang penting dalam memahami dinamika yang terjadi di masyarakat. Peneliti juga mengamati penggunaan teknologi dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta bagaimana hal ini mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen terkait, seperti peraturan perpajakan, data statistik mengenai produksi kelapa sawit, dan laporan keuangan

dari kebun kelapa sawit. Dokumen-dokumen ini membantu peneliti dalam memperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai sistem pajak yang diterapkan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan analisis tematik. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema kunci, pola, dan hubungan yang muncul. Peneliti berusaha untuk memahami makna di balik temuan tersebut, serta implikasinya terhadap transformasi sistem pajak penghasilan di Mandailing Natal. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih baik di era ekonomi digital.

3. Hasil Dan Pembahasan

Transformasi sistem pajak penghasilan di Mandailing Natal di era ekonomi digital menunjukkan dampak yang signifikan terhadap cara pengelolaan pajak, khususnya dalam sektor kebun kelapa sawit. Penerapan teknologi digital, seperti aplikasi untuk pelaporan dan pembayaran pajak, telah membawa perubahan positif dalam efisiensi administrasi perpajakan. Contohnya, petani dan pengusaha kini dapat menggunakan aplikasi yang memungkinkan mereka untuk melaporkan kewajiban pajak secara online (Arimbhi et al., 2021), mengurangi waktu dan tenaga yang sebelumnya digunakan untuk proses manual. Hal ini tidak hanya mengurangi beban administratif tetapi juga meningkatkan akurasi data yang dilaporkan.

Namun, tantangan yang dihadapi masyarakat tetap besar. Tingkat literasi digital yang rendah di kalangan petani menjadi kendala utama. Banyak petani, terutama yang berusia tua, merasa kesulitan dalam menggunakan teknologi. Dalam sebuah wawancara, seorang petani kelapa sawit berusia 55 tahun mengungkapkan, "Saya belum terbiasa dengan aplikasi ini, dan kadang-kadang saya merasa bingung tentang apa yang harus dilakukan." Hal ini menunjukkan perlunya program pelatihan yang lebih intensif untuk membantu mereka memahami dan memanfaatkan sistem pajak yang baru. Keterbatasan akses terhadap teknologi di daerah terpencil juga menjadi masalah. Sebagai contoh, di beberapa desa di Mandailing Natal, koneksi internet yang tidak stabil menyulitkan petani untuk mengakses aplikasi pajak secara konsisten. Dalam situasi ini, pemerintah perlu menyediakan solusi seperti pelatihan di lokasi yang lebih mudah diakses atau meningkatkan infrastruktur internet di daerah tersebut (Dumak Parerungan, n.d.).

Isu perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian penting. Dengan meningkatnya penggunaan sistem digital, data wajib pajak menjadi lebih rentan terhadap kebocoran dan penyalahgunaan. Dalam wawancara, pejabat pajak daerah menyatakan, "Kami telah mengimplementasikan sistem keamanan, tetapi kami juga menyadari bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan data mereka masih menjadi tantangan." Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa sistem yang digunakan untuk mengelola data wajib pajak dilengkapi dengan langkah-langkah keamanan yang kuat, termasuk enkripsi data dan kebijakan akses yang ketat.

Interaksi antara pemerintah dan masyarakat perlu diperkuat. Pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara petani. Misalnya, jika pemerintah mengadakan forum diskusi dengan petani untuk membahas perubahan dalam kebijakan pajak, hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan dari masyarakat (Wijaya et al., 2018). Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa petani yang dilibatkan dalam proses perencanaan merasa lebih bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh juga dapat mendorong keterlibatan lebih aktif dari masyarakat. Contohnya, pemerintah daerah dapat menawarkan potongan pajak bagi petani yang melaporkan pendapatan secara jujur dan tepat waktu. Insentif semacam ini tidak hanya mendorong kepatuhan, tetapi juga dapat

meningkatkan rasa keadilan di antara petani yang merasa bahwa kontribusi mereka dihargai (Tambunan & Anwar, 2019).

Secara keseluruhan, transformasi sistem pajak penghasilan di Mandailing Natal di era ekonomi digital menawarkan peluang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, keberhasilan implementasi sistem ini sangat tergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi tantangan yang ada, serta membangun kerjasama yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan sistem pajak penghasilan dapat berfungsi secara efektif dan efisien, memberikan manfaat bagi semua pihak (Cahyadi & Luciana, n.d.).

5. Kesimpulan Dan Saran

Transformasi sistem pajak penghasilan di Mandailing Natal di era ekonomi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam administrasi perpajakan, khususnya di sektor kebun kelapa sawit. Penerapan teknologi digital dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak memberikan kemudahan akses dan efisiensi yang sebelumnya tidak dapat dicapai melalui sistem konvensional. Namun, tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya literasi digital di kalangan petani dan keterbatasan infrastruktur teknologi, masih menjadi hambatan utama dalam implementasi sistem ini. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun pemerintah telah berupaya untuk memperkenalkan sistem digital, banyak petani yang merasa kesulitan dalam mengadaptasi teknologi baru. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai kewajiban perpajakan dan manfaat dari kepatuhan pajak. Selain itu, perlindungan data pribadi wajib pajak menjadi isu yang harus ditangani dengan serius, agar masyarakat merasa aman dalam menggunakan sistem digital.

Interaksi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat juga sangat penting. Pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak dapat menciptakan rasa kepemilikan di kalangan petani, sehingga meningkatkan kepatuhan dan dukungan terhadap sistem pajak. Pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh juga dapat menjadi strategi efektif untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam sistem perpajakan. Secara keseluruhan, keberhasilan transformasi sistem pajak penghasilan di Mandailing Natal sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi tantangan yang ada serta membangun kerjasama yang solid dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan sistem pajak penghasilan dapat berfungsi secara efektif dan efisien, memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arimbhi, P., Rahmi, N., Wulandari, W., Ramdan, A., Rachmatulloh, I., Sosial, I. I., & Stiarni, M. (2021). Peluang dan Tantangan Pajak Digital di Indonesia. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* (Vol. 4, Issue 2).

<http://ojs.stiarni.ac.id> Cahyadi

A., & Luciana, B. J. (n.d.). Komitmen Indonesia dalam Mengatur Pajak Digital sebagai Bentuk Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan XVII Indonesia's Commitment to Regulate Digital Tax as a Form of Realization of Goal XVII Sustainable Development Goals (SDGs).

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/202205300615>

Chatterton, T., & Newmarch, G. (2017). The future is already here- it's just not very evenly distributed. *Interactions*, 24(2), 42-45.

<https://doi.org/10.1145/3041215>

- Dumak Parerungan, S. (n.d.). Dampak Kebijakan Perpajakan Digital terhadap Pelaporan Pajak UMKM di Era Ekonomi Platform. In *Journal Scientific of Mandalika (jsm)* e-ISSN (Vol. 6, Issue 2).
- Raihandini, M., Furqon, I. K., Negeri, I., & Abdurrahman Wahid, K. H. (n.d.). Analisis Efektifitas Pengaruh Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Era Digital.
- Tambunan, M. R. U. D., & Anwar, R. (2019). Transformasi Budaya Organisasi Otoritas Perpajakan Indonesia Menghadapi Era Ekonomi Digital. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*.
<https://doi.org/10.17358/jabm.5.2.253>
- Wijaya, S., Utamawati, H., Keuangan Negara STAN, P., Bintaro Utama Sektor, J. V, & Jaya Tangerang Selatan, B. (2018). Pajak Penghasilan dari Ekonomi Digital atas Cross-Boarder Transaction. 3(Desember), 135-148.
<https://tirto.id/kesempatan-dan-kesempitan-ekonomi-digital-indonesia-vxu>].